

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
 2. Tugas : Memberi dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa  
 3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;  
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;  
 3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;  
 4. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;  
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
 4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN/ SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tertatanya kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pedesaan  Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna - (TTG)	%  Unit	- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  - PP No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.  - PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. - PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  - KEMENAG RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah  - PERGUB No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis PPD  - PERDA No. 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1	2	3	4	5
2.	Berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	- Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Desa	%	- PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan - PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan - KEPMENEK.PP No. 41/KEP/MENEK.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera - PERGUB No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis PPD - PERDA No. 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3.	Terselenggaranya pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang efektif dalam memfasilitasi proses pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik	- Persentase Terlaksananya rapat koordinasi pejabat daerah dengan camat, lurah, kades dan BPD se kabupaten siak. - Persentase Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tepat Waktu - Persentase Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan - Peningkatan Kualitas Kelembagaan - Persentase Administrasi yang baik dan tertib - Peningkatan dan Pengembangan Peggelolaan Keuangan Daerah - Persentase Usulan Pemekaran Desa yang telah di susun ranperdanya	% % % % % % % %	- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa - PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekeayaan Desa - KEPMENDAGR No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan - PERDA No. 9 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa - PERDA No. 5 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa - PERDA No. 8 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemilihan dan Pemberhentian BPD - PERBUB No. 12 Tahun 2014 tentang Penedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**